

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keluarga korban Semanggi I yang mengikuti Aksi Kamisan memiliki kepercayaan yang rendah kepada pemerintah. Penelitian ini memberikan gambaran komponen kognitif, afektif dan perilaku dari kepercayaan keluarga korban. Komponen kognitif keluarga korban memperlihatkan penilaian atau evaluasi yang negatif terhadap pemerintah serta pola atribusi intensional mengenai terhambatnya penyelesaian konflik. Komponen afektif keluarga korban menunjukkan emosi negatif dan persepsi risiko tinggi dari berinteraksi dengan pemerintah. Namun keluarga korban tetap cenderung berinteraksi secara damai dengan pemerintah karena adanya dependensi yang tinggi antara pemerintah dan keluarga korban dalam hal penyelesaian kasus.
2. Tingkat kepercayaan rendah keluarga korban Semanggi I yang ikut Aksi Kamisan terhadap pemerintah tidak menghambat penyelesaian kasus non-judisial. Kepercayaan yang rendah tidak memungkinkan keluarga korban untuk menerima ketidakpastian hukum mekanisme non-judisial yang diwacanakan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan rendah keluarga korban Semanggi I yang ikut Aksi Kamisan kepada pemerintah memiliki fungsi adaptif bagi keluarga korban agar dapat terhindari dari penyelesaian konflik yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak pada keluarga korban. Selain itu, tingkat kepercayaan dapat menjadi indikator bagi pemerintah untuk mengetahui efektifitas kebijakan politik yang diambilnya.
3. Tindakan dan kebijakan pemerintah terkait penyelesaian kasus Semanggi I menurunkan kepercayaan keluarga korban karena

kurangnya kepastian hukum dari kebijakan tersebut. Kepastian merupakan salah satu unsur yang membentuk kepercayaan. Dengan demikian, keluarga korban mau menerima mekanisme penyelesaian konflik non-judisial jika ada kepastian hukum berupa undang-undang atau perppu yang melingkupi mekanisme tersebut. Kebijakan-kebijakan konkrit terkait penyelesaian kasus juga harus dibarengi dengan kebijakan reformasi di segi hukum dan struktur lainnya sehingga menjamin kekerasan yang sama tidak akan berulang. Keadilan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi bagi korban, pelaku dan masyarakat perlu dikedepankan dan diberikan kepastian hukum. Keadilan dan pemaafan perlu dilakukan secara komplementer dan dipayungi regulasi yang kuat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan keluarga korban terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan kasus namun juga diindikasikan dapat meningkatkan kepercayaan secara general.

4. Strategi mengelola kepercayaan korban sangat dibutuhkan namun tidak dapat dilakukan dengan hanya sebuah kebijakan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memerhatikan tuntutan utama atau *salient goal* keluarga korban. Di antara kebutuhan-kebutuhan keluarga korban, terdapat sebuah kebutuhan yang sangat menonjol yang pemenuhannya meningkatkan kepercayaan mereka. Dalam konteks ini, keluarga korban yang masih tergabung dalam Aksi Kamisan membutuhkan keadilan yang dicapai lewat mekanisme judicial. Kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa terdapat keluarga korban lain yang tidak terjangkau penelitian ini yang mungkin memiliki tuntutan utama (*salient goal*) yang berbeda yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan sebuah pemetaan keluarga korban berdasarkan tuntutan dan kebutuhannya sebelum merumuskan strategi yang kontekstual untuk setiap kelompok.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Terbatasnya periode waktu di mana kebijakan pemerintah dibuat. Secara keseluruhan, penelitian hanya menganalisis tindakan dan kebijakan pemerintah semenjak 2014. Dengan demikian, tidak bisa secara detail menjelaskan perilaku atau kebijakan pemerintah yang mana yang merusak kepercayaan keluarga korban secara mendalam.
2. Penelitian ini juga tidak menggapai keluarga korban yang tidak pernah mengikuti Aksi Kamisan dan berhenti mengikuti Aksi Kamisan. Padahal, kecenderungan perilaku mundur dari Aksi Kamisan dapat menjadi objek penelitian kepercayaan yang kaya. Peneliti bisa mendapatkan gambaran dinamika tingkat kepercayaan seseorang sebab terdapat perubahan kecenderungan perilaku, dari mengikuti Aksi Kamisan hingga mundur.
3. Penelitian ini belum melakukan analisis mendalam mengenai hubungan antara tingkat kepercayaan keluarga korban kepada pemerintah dengan tingkat kepercayaan keluarga korban terhadap rezim atau sistem politik negara secara umum. Analisis terkait variabel-variabel ini akan sangat bermanfaat untuk memprediksi dinamika politik ke depan.

Rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menganalisis hubungan keluarga korban, pemerintah dan aktor lainnya seperti TNI dengan periode yang lebih panjang. Penambahan aktor ini penting karena temuan baru terkait persepsi sebagai korban yang dimiliki anggota TNI dalam pelanggaran HAM masa lalu.
2. Menggapai keluarga korban yang belum tersentuh penelitian ini, terutama mengenai nilai keadilan yang sekarang mereka percayai. Menggapai keluarga korban yang tidak mengikuti Aksi Kamisan juga dapat

menggambarkan dinamika persepsi sebagai korban dan memberikan kontribusi pada teori tentang korban atau viktimologi.

3. Melakukan wawancara mendalam kepada keluarga korban mengenai kepercayaannya terhadap institusi politik dan sistem politik negara.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang KKR untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu menjadikan kepercayaan keluarga korban sebagai indikator keberhasilan kebijakannya dan definisi dari rekonsiliasi.
2. DPR perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam proses penyelesaian kasus. Dengan adanya pengawasan dari DPR maka seharusnya pemerintah bekerja lebih efektif.